



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penundaan
ASEAN-European Union Free Trade Agreement
Tahun 2009

Skripsi

Oleh
Noor Halimah Anjani
2016330150

Bandung
2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penundaan
ASEAN-European Union Free Trade Agreement
Tahun 2009

Skripsi

Oleh
Noor Halimah Anjani
2016330150

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

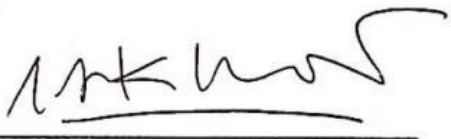
Nama : Noor Halimah Anjani
Nomor Pokok : 2016330150
Judul : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penundaan *ASEAN-European Union Free Trade Agreement* Tahun 2009

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Pada Jumat, 3 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua Sidang Merangkap Anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A.

: 


Sekretaris

Dr. A. Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

: 

Anggota

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noor Halimah Anjani

NPM : 2016330150

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penundaan *ASEAN-European Union Free Trade Agreement* Tahun 2009

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 6 Januari 2020



Noor Halimah Anjani

ABSTRAK

Nama : Noor Halimah Anjani

NPM : 2016330150

Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penundaan *ASEAN-European Union Free Trade Agreement* Tahun 2009

ASEAN dan Uni Eropa adalah merupakan dua organisasi regional dengan kemitraan yang terjalin lebih dari 40 tahun. Substansi utama kemitraan kedua organisasi terletak pada kegiatan ekonomi yang dilakukan seperti ekspor dan impor, investasi, bantuan pembangunan, dan bisnis. Pada tahun 2007 Uni Eropa dan ASEAN memulai negosiasi perdagangan bebas. Akan tetapi pada tahun 2009 negosiasi tersebut ditunda.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor dibalik penundaan ASEAN-EU FTA. Dalam analisis, penulis mengacu pada 3 kerangka pemikiran utama yaitu teori neoliberal, teori intergrasi ekonomi, dan konsep interregionalisme.

Penelitian ini menemukan ada empat faktor yang memengaruhi penundaan perjanjian tersebut yaitu permasalahan HAM di Myanmar, heterogenitas ekonomi ASEAN, perbedaan integrasi ekonomi antara ASEAN dan Uni Eropa, dan terakhir kompleksitas proposal FTA yang diajukan oleh Uni Eropa.

Kata Kunci: *ASEAN, Uni Eropa, ASEAN-EU Free Trade Agreement, Integrasi Ekonomi, Interregionalisme.*

ABSTRACT

Name : Noor Halimah Anjani
Student Number : 2016330150
Title : Factors that Influence the Suspension of ASEAN-European Union Free Trade Agreement in 2009.

ASEAN and the European Union are two regional organizations with partnerships that have existed for more than 40 years. The main substance of the partnership between the two organizations lies in the economic activities carried out such as exports and imports, investment, development assistance, and business. Recognizing the increasing intensity of economic relations, in 2007 the EU and ASEAN began free trade negotiations. However, in 2009 the negotiations were suspended.

The objective of this research is to explain the underlying factors that caused the suspension of ASEAN-EU FTA. In analyzing it, the writer refers to 3 theoretical frameworks, namely neoliberal theory, economic integration theory, and interregionalism concept.

This research has found that there are four factors that influenced the suspension of the FTA: Myanmar's problem with human rights, ASEAN economic heterogeneity, differences between the degree of ASEAN and European Union economic integration, and last is European Union complex proposal for the FTA.

Keywords: ASEAN, European Union, ASEAN-EU Free Trade Agreement, Economic Integration, Interregionalisme.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pimpinan dalam setiap langkah kehidupan penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktu-Nya. Penelitian ini menjelaskan mengenai Faktor-Faktor dibalik Penundaan ASEAN-EU FTA. Kegagalan Putaran Doha dalam menghasilkan *output* yang substansial untuk mendorong perdagangan dunia menjadi alasan mengapa negara-negara memutuskan untuk meninggalkan forum ekonomi multilateral dan beralih pada perjanjian kerja sama ekonomi secara bilateral maupun regional. Hingga tahun 2019, WTO mencatat terdapat 288 perjanjian perdagangan regional. Pada tahun 2007, ASEAN dan UE memulai negosiasi FTA yang dinilai sebagai FTA ambisius karena mencangkup dua geografis yang besar. Potensi yang dimiliki oleh FTA kedua organisasi juga sangat tinggi. Akan tetapi pada tahun 2009, negosiasi dihentikan dan FTA antara kedua organisasi ditunda. Skripsi ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penundaan tersebut dan melihat bagaimana keberlanjutan FTA ini.

Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan Terima Kasih kepada Mas Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. selaku Dosen Pembimbing. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan, hingga penyelesaian skripsi ini. Menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan penulis sangat terbuka akan kritik, saran, maupun masukan yang membangun terkait dengan penelitian ini.

Terima Kasih.

Penulis

Noor Halimah Anjani

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh perkuliahan di HI UNPAR dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis atas motivasi dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis, serta dukungan baik itu moral maupun materil, semoga Bunda dan Yanda bangga dengan apa yang sudah Halimah capai selama masa kuliah ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bisa menyelesaikan proses perkuliahan dengan tepat waktu sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono atas saran dan arah yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih mas sudah mau menerima saya sebagai salah satu anak bimbingan Mas Ir. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen HI UNPAR atas seluruh ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman penulis selama berkuliah di UNPAR. Untuk Miftahul Choir, Michelle Patricia, Joe William, Agnes Gianni, Fransiska Andita, Akmal Septyadana, Ezra Permana, Hanna Maureen, Aditya Imansyah, Nicander Wijaya, Gisela Bernadi, dan Ardiani Hanifa, terima kasih sudah menjadi teman yang baik, teman yang selalu memberikan dukungan dalam kegiatan akademik dan non-akademik, yang selalu

bisa dijadikan tempat untuk cerita dan meminta pendapat, terima kasih sudah mau menjadi teman dalam kehidupan perkuliahan yang *chaos* ini. Terima kasih untuk teman-teman Divisi Penelitian dan Pengembangan HMPSIHI: Aretta Ananda, Shella Lodra, Bella Aprillia, Jonathan Prasetyo, Leonardo Ganal, dan Serafine Pauline, terima kasih sudah menjadi teman kerja yang baik dan seru. Terima kasih juga untuk seluruh anggota delegasi Republik Federal Jerman: Affi, Hanna, Jasonia, Miftahul, Mutiara, Olivia, Savitri, Sheila, Taya, dan Puput yang sudah membuat Prakdip *bearable* dengan candaan dan ‘kebodohan’ kita semua. Dan juga untuk Rabbit Hole, terima kasih telah menjadi kafe yang nyaman untuk menulis skripsi, datang jam 10 pagi bertahan sampai jam 9 malam dengan progress yang banyak.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi siapapun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan dan berharap selanjutnya dapat bisa menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR AKRONIM.....	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah	8
1.2.3 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian	9
1.4 Kajian Pustaka	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	15
1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	23
1.6.1 Metodologi Penelitian.....	23
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.7 Sistematika Pembahasan	25
BAB II Hubungan Ekonomi ASEAN Dengan Uni Eropa.....	26
2.1 Perdagangan Barang dan Jasa ASEAN – Uni Eropa	30
2.2 Hubungan Investasi ASEAN – Uni Eropa.....	36

2.3	Perbedaan Tingkat Integrasi Ekonomi di ASEAN dan Uni Eropa	39
2.4	Hubungan Politik ASEAN dan Uni Eropa.....	48
BAB III Upaya Pembentukan ASEAN-EU FTA		50
3.1	Pentingnya Uni Eropa bagi ASEAN dan ASEAN bagi Uni Eropa.....	53
3.2	Laporan <i>Vision Group on ASEAN – EU Economic Partnership</i> Sebagai Titik Awal ASEAN-EU FTA	57
3.3	Pertemuan-Pertemuan untuk Membahas ASEAN-EU FTA	61
BAB IV Faktor-Faktor Dibalik Penundaan ASEAN – EU FTA Tahun 2009		69
4.1	Permasalahan Hak Asasi Manusia di Myanmar.....	72
4.2	Perbedaan Level Pembangunan Ekonomi di ASEAN: Kamboja dan Laos	79
4.3	Perbedaan Tingkat Integrasi Regional di ASEAN dan Uni Eropa.....	84
4.4	Beberapa Persoalan dalam ASEAN-EU FTA: HAKI dan Pembangunan Berkelanjutan	87
BAB V Kesimpulan.....		99
DAFTAR PUSTAKA		102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dukungan UE untuk Komunitas ASEAN.....	29
Tabel 2.2 Perdagangan Barang Negara Anggota ASEAN dengan UE 2015.....	33
Tabel 4.1 GDP Per Capita Negara Anggota ASEAN (dalam Juta Dolar)	80
Tabel 4.2 Persentase Perdagangan Barang, Ekspor dan Impor UE dengan ASEAN, 2008 dan 2009 (dalam %)	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perdagangan Barang ASEAN Dengan Uni Eropa 2007 – 2016 (Dalam Juta Dolar).....	31
Grafik 2.2 Tarif Rata-Rata Dan Maksimum 10 Komoditas Utama Impor ASEAN Dari UE	34
Grafik 2.3 Tarif Rata-Rata Dan Maksimum 10 Komoditas Utama Impor	34
Grafik 2.4 Lima Sektor Utama Perdagangan Jasa UE-ASEAN, Dalam Euro	35
Grafik 2.5 Total Perdagangan Intra Dan Ekstra ASEAN, 1993 – 2013	45

DAFTAR AKRONIM

ACFTA	<i>ASEAN–China Free Trade Area</i>
ACIA	<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement</i>
AEM	<i>ASEAN Economic Minister</i>
AEMM	<i>ASEAN-EC Ministerial Meeting</i>
AFAS	<i>ASEAN Framework Agreement of Service</i>
AFTA	<i>ASEAN Free Trade Area</i>
AIA	<i>ASEAN Investment Area</i>
AICHR	<i>ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights</i>
AMM	<i>ASEAN Foreign Ministers Meeting</i>
APRIS	<i>ASEAN Programme for Regional Integration Support</i>
ARF	<i>ASEAN Regional Forum</i>
ARISE	<i>ASEAN Regional Integration Support from the EU</i>
ASEAN	<i>Association of Southeast Asia Nations</i>
BSE	Bank Sentral Eropa
CEPT	<i>Common Effective Preferential Tarif</i>
CISFTA	<i>Commonwealth of Independent States Free Trade Area</i>
EEC	<i>European Economic Community</i>
EMI	<i>European Monetary Institute</i>
EMU	Persatuan Ekonomi dan Moneter Eropa
E-READI	<i>Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument</i>
FDI	<i>Foreign Direct Investment</i>
FTA	<i>Free Trade Agreement</i>

GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
GSP	<i>Generalized System Preferences</i>
HAKI	Hak Kekayaan Intelektual
HAM	Hak Asasi Manusia
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
MEAs	<i>Multilateral Environmental Agreements</i>
NAFTA	<i>North American Free Trade Area</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PTA	<i>Prefrential Trading Agreement</i>
RTA	<i>Regional Trade Agreement</i>
SEM	<i>Single European Market</i>
TREATI	<i>Trans-Regional EU–ASEAN Trade Innitiative</i>
TRIPS	<i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
UE	Uni Eropa
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Terbentuk pada masa Perang Dingin dengan kondisi keamanan kawasan yang tidak stabil, *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) merupakan organisasi kawasan yang memiliki kontribusi besar pada keamanan dan pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Serupa dengan ASEAN, Uni Eropa (UE) terbentuk pasca Perang Dunia II dan dibentuk dengan harapan dapat mencegah terjadinya perang dan menginstitutionalisasi keamanan melalui integrasi ekonomi.¹ Kemiripan ASEAN dengan UE menjadikan kedua organisasi ini sebagai mitra natural. Baik ASEAN maupun UE sering kali dijadikan contoh organisasi kawasan yang berhasil, terutama karena keduanya telah berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan masing-masing.

Pada tahun 1972, ASEAN menginisiasikan sebuah dialog informal dengan UE yang sebelumnya dikenal sebagai *European Economic Community* (EEC). Dialog informal ini ditujukan untuk mencapai akses pasar yang lebih luas untuk ekspor ASEAN dan juga skema stabilisasi harga untuk komoditas utama negara anggota ASEAN. Dialog informal ini menjadi awal dari kerja sama UE dengan ASEAN selanjutnya dan menjadikan UE mitra pertama ASEAN. Di tahun 1977, UE resmi menjadi partner dialog eksternal ASEAN dengan diselenggarakannya

¹ Tommy Koh, "ASEAN and the EU: Differences and Challenges," *The Straits Times*, 22 Agustus, 2017. Diakses pada 9 September 2019, <https://www.straitstimes.com/opinion/asean-and-the-eu-differences-and-challenges>

10th *ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM)*² dan di tahun 1978 ASEAN dan UE mengadakan *ASEAN-EC Ministerial Meeting (AEMM)*.³

Pada pertemuan kedua AEMM di Malaysia tahun 1980, ASEAN dan UE menandatangani *ASEAN-EC Cooperation Agreement* yang menjadi kerangka legal dan institusional untuk mengembangkan kerja sama bilateral antara kedua organisasi. Poin utama yang menjadi *highlight* dari perjanjian ini adalah kerja sama ekonomi dan pembangunan, memperluas treatment *Most Favoured Nation (MFN)*. Akan tetapi, terlepas dari dihasilkannya perjanjian ini, hingga tahun 1980-an, hubungan dengan ASEAN tidak menjadi prioritas bagi UE.⁴

Memasuki tahun 1990-an hubungan UE dengan ASEAN mulai mengalami perkembangan, dalam *EU's New Asia Strategy 1994*, UE mulai memerhatikan hubungan yang sudah terjalin dengan ASEAN dan melihat hubungan UE-ASEAN sebagai landasan untuk memperluas hubungan dengan kawasan Asia. Akan tetapi, masuknya Myanmar sebagai anggota ASEAN di tahun 1997 menjadi sebuah kendala hubungan UE dengan ASEAN. Catatan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dilihat sebagai penghambat hubungan dengan ASEAN karena dalam *Common Foreign Security Policy* milik UE tertulis bahwa tujuan kerja sama UE dengan mitranya adalah untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan UE dengan ASEAN

²“Overview of ASEAN – European Union Dialogue Relationship,” *ASEAN Website*, <https://asean.org/>, diakses 13 September 2019.

³Yeo Lay Hwee, “ASEAN’s Cooperation with the European Union – ASEM and Beyond,” *Panorama 1*, (2017): 82.

⁴ *Ibid*, 83.

tidak selalu berjalan dengan mulus. Terlepas dari hal tersebut, hubungan UE dengan ASEAN dalam politik tetaplah berkembang.

Pada tahun 2001, Komisi Eropa mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang ditulis dalam “*Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnership*,” yang menyatakan ASEAN sebagai mitra kunci dalam ekonomi dan politik. Pernyataan ini diperkuat dengan kebijakan baru di tahun 2003.⁵ Dalam dokumen “*A New Partnership with Southeast Asia*,” UE memetakan enam prioritas strategis hubungan dengan ASEAN yaitu:

- a. Mendukung stabilitas regional dan melawan terorisme,
- b. Mempromosikan hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang baik dalam semua kebijakan EU dan kerja sama pembangunan,
- c. Dialog yang membahas isu migrasi, perdagangan manusia, pencucian uang, pembajakan, kejahatan terorganisir, dan narkoba,
- d. Membuat sebuah kerja sama *Trans-Regional EU–ASEAN Trade Initiative* (TREATI).
- e. Mendukung pembangunan negara kurang sejahtera, dan
- f. Meningkatkan dialog dalam bidang kebijakan tertentu.⁶

Selama 40 tahun hubungan yang telah terjalin antara kedua organisasi, UE telah memberikan banyak bantuan peningkatan kapasitas dalam beberapa tahun terakhir seperti *ASEAN Programme for Regional Integration Support* (APRIS)

⁵European Commission, “Communication From the Commission of Europe and Asia: a Strategic Framework for Enhanced Partnership,” 4 September 2001, Diakses 7 September 2019, https://ec.europa.eu/europeaid/communication-commission-europe-and-asia-strategic-framework-enhanced-partnerships_en.

⁶European Commission, “Press Release IP/01/1238 – EU – Asia: European Commission Adopt New Strategy for Enhanced Partnership,” 3 Juli 2001, diakses 7 September 2019, https://europa.eu/rapid/press-release_IP-01-1238_en.htm.

dari tahun 2003 – 2010, ASEAN *Regional Integration Support from the EU* (ARISE) di tahun 2012 - 2016⁷ dan pada tahun 2018 lalu, ASEAN dan UE meluncurkan dua program baru yaitu *ARISE Plus* dan *Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (E-READI)*.⁸

Dalam konteks hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi merupakan substansi utama dari kemitraan UE dengan ASEAN. Dalam lebih dari 40 tahun hubungan kedua organisasi, banyak kegiatan ekonomi baik perdagangan, investasi, maupun bantuan pembangunan yang sudah dilakukan oleh UE dan ASEAN. Dalam hal perdagangan, UE adalah mitra dagang kedua ASEAN setelah Tiongkok dengan total perdagangan 13.1%, sedangkan ASEAN merupakan mitra dagang ketiga UE dengan total perdagangan lebih dari 227.3 juta Euro ditahun 2017. Sedangkan dalam investasi, ASEAN masih menjadi destinasi utama FDI dari UE.⁹

Menyadari semakin meningkatnya intensitas hubungan perekonomian antara kedua organisasi, pada tahun 2006 dibentuk sebuah badan untuk mengkaji kemungkinan pembentukan *Free Trade Agreement (FTA)* antara kedua organisasi yang dikenal sebagai *The Vision Group on ASEAN-EU Economic Partnership*.¹⁰ FTA adalah bentuk kerja sama ekonomi yang berupa kesepakatan antara pihak-

⁷ Yeo Lay Hwee, 83.

⁸ European External Action Service, "EU and ASEAN launch two flagship programmes: ARISE Plus and E-READI," 17 April 2018, Diakses 7 September 2019, https://eeas.europa.eu/delegations/fiji/43068/eu-and-asean-launch-two-flagship-programmes-arise-plus-and-e-readi_it.

⁹ European Commission, "Association of South East Asian Nations (ASEAN)" diakses 8 Februari 2019, <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/asean/>.

¹⁰ Michela Astuto, "EU – ASEAN Free Trade Agreement Negotiations," Instituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale no. 26 (2010): 1. Diakses 8 Februari 2019, https://www.ispionline.it/it/documents/Analysis_26_2010.pdf

pihak yang terlibat untuk melakukan negosiasi terkait pengurangan hambatan perdagangan sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan perdagangan terutama dalam ekspor dan impor.¹¹ *Vision Group* tersebut melakukan pertemuan sebanyak enam kali untuk menganalisis pembentukan ASEAN-EU FTA. Setelah melakukan pengkajian, badan tersebut memberikan rekomendasi untuk segera membahas pembentukan FTA dengan ASEAN.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Pada tahun 2007, UE dan ASEAN melakukan perundingan terkait pembentukan ASEAN-EU FTA melalui pembentukan Komite Gabungan ASEAN–UE. Kegiatan negosiasi dilakukan untuk membahas perdagangan jasa, investasi, ketentuan asal barang, hambatan teknis dalam perdagangan, fasilitasi cukai, dan perdagangan, serta penyelesaian sengketa. Negosiasi telah dilakukan sebanyak tujuh kali dalam rentang waktu tahun 2007 hingga 2009.

Hingga pertemuan keempat Komite Gabungan, negosiasi FTA tidak memiliki progres yang signifikan. Hal ini pun disampaikan oleh perwakilan UE yang mengatakan proses negosiasi dengan ASEAN cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan negosiasi UE dengan

¹¹ Matthew Grimson, “Free Trade Agreements: What is an FTA and what are the benefits?” *ABC News*, 8 April 2014, diakses 8 Februari 2019, <https://www.abc.net.au/news/2014-04-07/free-trade-agreement-explained-bilateral-fta-tpp/5371314>.

Korea Selatan dan India. Banyaknya perbedaan pendapat dalam topik-topik yang dibahas membuat kedua organisasi kesulitan dalam mencapai kesepakatan terkait FTA yang akan dibentuk. Sebagai contoh, dalam beberapa topik seperti HAKI, Pembangunan Berkelanjutan, dan Pengadaan Publik, ASEAN memiliki perbedaan pandangan dengan UE, karena sebelumnya tidak pernah melakukan negosiasi dalam bidang tersebut. Terlebih lagi menurut perwakilan ASEAN, konsep HAKI, Pembangunan Berkelanjutan, dan Pengadaan Publik yang diajukan oleh UE terlalu rumit.¹²

Pada tahun 2009, ketika negosiasi sedang berlangsung, Komisi Eropa mempublikasikan *Trade Sustainability Impact Assesment* untuk memberikan informasi mengenai dampak area perdagangan bebas terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa area perdagangan bebas diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada semua negara. Hasil laporan menunjukkan dengan adanya area perdagangan bebas akan terjadi peningkatan GDP, peningkatan pemasukan, peningkatan arus perdagangan dan membuka lapangan pekerjaan untuk semua negara ASEAN secara signifikan, dan juga efek positif terhadap UE berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi.¹³

Laporan ini dikeluarkan untuk mendukung segera terlaksananya

¹² Department of Trade Negotiations Thailand, "Summary of the Sixth Meeting of the Joint Committee for the ASEAN-EU FTA," 3 November 2008, diakses 20 September 2019, [www.thaifta.com > trade > aseu > aseu_jc6](http://www.thaifta.com/trade/aseu/aseu_jc6)

¹³ European Parliament, "Driving Trade in the ASEAN regions Progress of FTA Negotiations," December 2016, diakses 8 Februari 2019, [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595850/EPRS_BRI\(2016\)595850_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595850/EPRS_BRI(2016)595850_EN.pdf).

pembentukan negosiasi ASEAN-EU FTA, karena proses negosiasi sudah berjalan dengan cukup lama.

Setelah melaksanakan perundingan selama 2 tahun, pada pertemuan ketujuh, Komite Gabungan sepakat untuk menunda negosiasi. Penundaan ini dilakukan karena kegagalan dalam mencapai keputusan yang dapat disepakati kedua pihak karena beberapa alasan seperti kompleksitas isu yang dibahas dalam negosiasi, permasalahan mengenai hak asasi manusia di Myanmar dan perbedaan pertumbuhan ekonomi antarnegara anggota ASEAN. Penundaan tersebut mendorong UE untuk kemudian melaksanakan perundingan dengan negara-negara anggota ASEAN secara bilateral, bukan regional. Keinginan untuk melaksanakan perundingan secara bilateral merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat daya saing melalui peningkatan akses pada pasar di negara ASEAN. Singapura dan Vietnam menjadi dua negara pertama yang mengesahkan kerja sama perdagangan dengan UE secara bilateral.

Beberapa akademisi menilai penundaan ASEAN-EU FTA adalah bentuk kegagalan interregionalisme antara dua organisasi yang sudah menjalin hubungan selama lebih dari 40 tahun. Salah satu akademisi menyatakan bahwa kegagalan negosiasi FTA tidak terletak pada formatnya, namun pada kompleksitas isu yang dibawa oleh UE, sehingga meskipun saat ini UE melakukan negosiasi secara bilateral, hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk melakukan renegosiasi dalam format *region-to-region* kedepannya. Terlebih hingga saat ini UE hanya

melakukan negosiasi bilateral dengan beberapa anggota ASEAN.¹⁴ Penelitian ini akan menggali dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan tertundannya ASEAN-EU FTA pada tahun 2009.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi penundaan ASEAN-EU FTA di tahun 2009. Rentang waktu yang akan digunakan adalah tahun 2007 hingga 2009. Pembatasan tahun tersebut dipilih karena penelitian ini fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan FTA antara ASEAN dan UE, yang negosiasinya dilakukan pada tahun 2007 hingga 2009.

1.2.3 Perumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjawab **“Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penundaan ASEAN-EU *Free Trade Agreement*?”**

¹⁴ D. Wnukowski, “How ASEAN’s Transformation Can Play Out Well for Europe,” *The Polish Institute of International Affairs*, (2016):

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penundaan perjanjian kerja sama tentunya akan memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif terhadap hubungan kedua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penundaan ASEAN-EU FTA di tahun 2009.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan wawasan untuk memahami mengenai penundaan ASEAN-EU FTA yang masih minim dibahas. Penulis berharap dapat memberikan informasi faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi sebuah perjanjian kerja sama. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bacaan bagi penulis lain yang ingin meneliti topik yang serupa dengan penelitian ini.

1.4 Kajian Pustaka

Kemunculan teori liberalisme dalam kajian Hubungan Internasional (HI) ditahun 1970an menjadi fondasi bagi para penstudi HI bahwa pola hubungan antarnegara tidak lagi diwarnai dengan peperangan, namun dengan kerja sama internasional. Negara-negara saat ini memutuskan untuk berkerjasama tidak hanya secara global, tetapi juga secara regional. Regional dalam konteks ini tidak hanya

terbatas pada negara yang berada dikawasan geografis yang sama atau memiliki kedekatan wilayah, namun juga dengan negara-negara yang berada di kawasan yang berebeda. Penelitian ini akan membahas mengenai kerja sama perdagangan bebas, terutama antara ASEAN dengan UE.

Dalam artikel yang berjudul *Regional Trade Agreement in a Multilateral Trade Regime: an Overview*, Parthapratim Pal menjelaskan bahwa munculnya perjanjian kerja sama perdagangan regional atau *Regional Trade Agreements* (RTAs) menunjukkan perkembangan kerja sama perdagangan di dunia. Menurutnya, RTAs yang ada saat ini tidak hanya beranggotakan negara-negara maju ataupun berkembang, tetapi gabungan dari keduanya. Lebih lanjut Pal menjelaskan mengenai alasan negara-negara bergabung dalam RTAs yang terbagi dalam tiga penjelasan. Pertama, liberalisasi perdagangan memiliki implikasi pada peningkatan volume perdagangan dan kesejahteraan. Kedua, ketidakpuasan pada rezim kerja sama multilateral saat ini. Menurut Pal, negara-negara lebih memiliki kerja sama regional karena kerja sama multilateral memuat banyak anggota dengan berbagai kepentingan sehingga memperlambat negosiasi dan menciptakan ketegangan dalam sistem. Ketiga, efek *bandwagon* dari regionalisme. Pal menjelaskan bahwa saat ini negara-negara berkembang berlomba-lomba untuk membentuk kerja sama dengan negara maju. Hal ini disebabkan oleh keinginan untuk dapat mengakses pasar yang lebih luas. Dampak dari kerja sama ini adalah keinginan negara-negara yang belum tergabung dalam sebuah kerangka kerja sama untuk membentuk kerangka kerja sama baru dengan negara-negara lain yang

juga belum memiliki kerja sama perdagangan. Ketiga hal ini menurut Pal menjadi alasan meningkatnya RTAs dalam beberapa tahun terakhir.¹⁵

Martin Khor dalam bukunya berjudul *Bilateral and Regional Free Trade Agreements: Some Critical Elements and Development Implications* menuliskan bahwa saat ini negara-negara berkembang merupakan anggota dari perjanjian kawasan perdagangan bebas secara bilateral dan regional, ataupun terlibat dalam proses negosiasi pembuatan kerja sama tersebut. Akan tetapi, dalam bukunya Khor lebih membahas dampak kerja sama perdagangan bebas antara negara maju dengan negara berkembang. Menurut Khor, negara-negara maju umumnya memiliki format tertentu yang berdampak pada ruang pembuatan kebijakan di negara berkembang. Kerja sama perdagangan bebas umumnya memberikan tekanan pada negara berkembang untuk liberalisasi dan mengurangi ruang gerak pembuat kebijakan dalam menentukan sektor mana yang akan di liberalisasi dan jangka waktunya.¹⁶

Khor menjelaskan bahwa kerja sama bilateral perdagangan bebas antara negara berkembang dengan negara maju bukan pilihan yang baik. Menurutnya dalam konteks kerja sama negara berkembang dan negara maju, format kerja sama multilateral adalah pilihan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu, pertama kemungkinan munculnya *trade diversion* dalam kerja sama bilateral. Kedua, posisi negara berkembang cenderung lemah dalam negosiasi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kekuatan ekonomi, politik, sumber daya

¹⁵ Parthapratim Pal, "Regional Trade Agreements in a Multilateral Trade Regime: an Overview," *Foreign Trade Review* 40, no.11 (2005): 4-8

¹⁶ Martin Khor, *Bilateral and Regional Free Trade Agreements: Some Critical Elements and Development Implication*, (Malaysia: Third World Network, 2008) hlm. 20

manusia, dan tekanan pada sumber daya keuangan negara berkembang sehingga membutuhkan banyak ahli pada bidang tertentu yang mungkin tidak tersedia. Ketiga, penyesuaian kebijakan serta standar-standar yang harus dipenuhi oleh negara berkembang yang dapat melemahkan posisi negara berkembang dalam negosiasi. Negara maju cenderung memiliki aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan lingkungan, standar-standar produk, dan kebijakan lain yang dapat melemahkan posisi negara berkembang dalam negosiasi. Oleh karena itu, negosiasi antara negara maju dan negara berkembang dalam perjanjian kerja sama perdagangan bebas perlu dilakukan secara komprehensif untuk meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.¹⁷

Pernyataan Khor didukung oleh Grzegorz Mazur dalam penelitiannya mengenai *EU – ASEAN Free Trade Agreements – Prospect and Challenges for Inter-regional FTA*.¹⁸ Menurut Mazur, kerja sama UE dan ASEAN akan lebih bias ke UE. Hal ini disebabkan karena perbedaan kekuatan ekonomi antara kedua pihak serta aturan-aturan dari UE yang dapat memberatkan negara-negara anggota ASEAN. Akan tetapi, hal tersebut masih dapat dihindari dengan adanya negosiasi yang lebih baik. Menurut Mazur, jika perjanjian antara ASEAN dan UE berhasil disepakati, ASEAN-EU FTA dapat menjadi contoh sukses *region-to-region* FTA.

Lebih lanjut dalam tulisannya Mazur membahas tantangan yang akan dihadapi negara-negara anggota ASEAN dan UE dalam skema kerja sama

¹⁷ Khor, *Bilateral and Regional Free Trade Agreements: Some Critical Elements and Development Implication*, hlm. 70 – 76.

¹⁸ Grzegorz Mazur, “EU – ASEAN Free Trade Agreements – Prospect and Challenges for Inter-regional FTA,” *Research Papers of Wroclaw University – The Development Challenges of Asia-Pacific Countries*, (2017): 142 -154.

perdagangan bebas tersebut. Menurutnya, pasar ASEAN sangatlah menarik untuk meningkatkan ekspor UE terutama dalam sektor makanan dan minuman. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN yang baik serta meningkatnya jumlah penduduk dengan status kelas menengah di berbagai negara anggota ASEAN memberikan kesempatan untuk UE dalam meningkatkan impornya. Akan tetapi, kendala utama yang akan dihadapi UE salah satunya adalah keanggotaan Myanmar yang masih dilihat oleh UE sebagai hambatan untuk mencapai kesepakatan FTA dengan ASEAN. Hal ini disebabkan permasalahan hak asasi manusia yang ada di Myanmar, sedangkan UE sendiri memiliki kebijakan untuk mengutamakan hak asasi manusia dalam setiap perjanjian kerjanya sesuai dengan Perjanjian Lisbon. Mazur menyimpulkan kerja sama antara ASEAN dan UE tidak hanya memberikan dampak pada perekonomian ASEAN tetapi juga pada aspek lain seperti peningkatan kualitas demokrasi, hak asasi manusia, pemerintahan yang baik, pengurangan kemiskinan, pendidikan, peningkatan dan perbaikan iklim perdagangan dan investasi, serta penyelesaian masalah lingkungan.

Tulisan Katharina Luise Miessner yang berjudul *A Case of Failed Interregionalism? Analyzing the EU-ASEAN Free Trade Agreement Negotiations* membahas mengenai kegagalan UE dalam mencapai negosiasi dengan ASEAN. Menurutnya, salah satu alasan mengapa UE mencoba memasuki kawasan Asia Tenggara adalah karena UE memiliki keinginan untuk dapat masuk ke pasar negara anggota ASEAN seperti Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan yang sudah lebih dulu memasuki pasar ASEAN dan memiliki kerja sama perdagangan. Hal ini dikarenakan menurut UE pasar ASEAN memiliki

potensi besar untuk UE meningkatkan daya saing dan akses pasar yang lebih luas sesuai dengan *Global Europe Communications* di tahun 2006.

Akan tetapi dalam melakukan negosiasi dengan ASEAN, ada beberapa hal yang di 'lupakan' oleh UE, yaitu ASEAN sangat berbeda dengan UE baik dari segi politik dan segi ekonomi. Pendekatan yang dilakukan oleh UE di tahun 2007 untuk membentuk sebuah FTA dengan melihat ASEAN sebagai blok kesatuan ternyata bukanlah langkah yang baik. Meskipun ASEAN memiliki kesamaan posisi dalam unsur-unsur tradisional dari perdagangan bebas dan perdagangan secara umum, namun dalam hal investasi, jasa, dan hambatan non-tarif negara anggota ASEAN justru memiliki kepentingan dan posisi yang berbeda-beda. Hal ini juga terjadi karena perbedaan ekonomi negara-negara ASEAN, terutama di tahun 2007. Miessner menilai kegagalan UE dalam mencapai negosiasi yang diharapkan dengan ASEAN terletak pada pendekatan yang dilakukan oleh UE.

Kegagalan UE dalam menghasilkan ASEAN – EU FTA tentunya adalah sesuatu yang mengejutkan jika melihat dari sejarah kerja sama antara kedua anggota. Miessner mengatakan bahwa kegagalan ini dipengaruhi beberapa hal seperti ketidaksiapan ASEAN untuk melakukan negosiasi dengan UE, mengingat di tahun 2007 negara anggota ASEAN sedang dalam tahap pembangunan ekonomi dan di waktu yang bersamaan melakukan negosiasi dengan aktor lain sehingga tidak memberi prioritas pada negosiasi dengan UE. Selain itu pendekatan yang dilakukan oleh UE juga menurutnya belum bisa diterapkan untuk ASEAN pada masa tersebut. Dalam negosiasi tersebut UE membahas isu-isu seperti hambatan teknis atau hambatan non-tarif dan permasalahan *Intellectual*

Property Rights – sesuatu yang masih baru untuk negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN belum siap untuk melakukan liberalisasi dalam isu tersebut.

Keempat artikel yang telah dibahas memberikan gambaran mengenai dampak positif dan negatif hubungan kerja sama ekonomi. Kesamaan beberapa jurnal tersebut terletak pada penekanan bahwa kerja sama perdagangan akan memberikan dampak positif pada peningkatan ekspor, impor, dan investasi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam kerja sama. Selain itu, terdapat pandangan bahwa kerja sama perdagangan bebas dapat memberikan efek positif pada peningkatan kondisi politik dan sosial disuatu negara.

Akan tetapi, dari keempat artikel, hanya satu artikel yang membahas secara khusus mengenai penundaan ASEAN – EU *Free Trade Agreement*. Penelitian ini akan fokus dalam menganalisa faktor-faktor penundaan ASEAN-EU FTA. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan adalah penelitian ini fokus pada bagaimana faktor-faktor penundaan berpengaruh pada proses negosiasi. Sedangkan penelitian yang ada sebelumnya membahas mengenai dinamika hubungan ASEAN dan UE dan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai penyebab penundaan ASEAN-EU FTA.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis penelitian ini, penulis akan menggunakan teori neoliberalisme, teori integrasi ekonomi, dan konsep interregionalisme. Teori neoliberalisme muncul sebagai bentuk turunan dari teori liberalisme klasik.

Berbeda dengan liberalisme klasik yang melihat negara sebagai aktor utama, neoliberalisme menekankan pada kehadiran institusi atau organisasi yang dapat memfasilitasi kerja sama internasional. Neoliberalisme meyakini adanya pluralisme aktor dalam hubungan internasional yaitu negara, birokrasi, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah internasional, perusahaan multinasional, dan individu.¹⁹ Oleh karena itu keberadaan organisasi regional dan internasional seperti ASEAN, UE, Uni Afrika, *International Monetary Fund* (IMF), *World Trade Organization* (WTO), dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilihat oleh para pemikir neo-liberalis sebagai bentuk baru kerja sama internasional.

Ada beberapa pandangan mengenai teori neoliberalisme yang berpengaruh pada perkembangan teori ini, salah satunya adalah karya Robert Keohane dengan Joseph Nye yang berjudul *'Power and Interdependence'*. Dalam karyanya, Keohane dan Nye menjelaskan bahwa ancaman perang dapat dihindari dengan membentuk kerja sama yang bersifat saling ketergantungan antarnegara, terutama negara berkembang, dalam beberapa sektor, khususnya perdagangan, investasi, teknologi, energi, dan sebagainya.²⁰ Menurut David A. Baldwin, neoliberalisme meyakini liberalisasi pasar, yaitu terbukanya jalur perdagangan ekonomi antar negara dengan hambatan yang minim, berkontribusi pada penyatuan kepentingan yang dimiliki oleh negara-negara sehingga memungkinkan terciptanya perdamaian dunia.²¹ Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam beberapa

¹⁹ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis*. (Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia 2017), hlm. 107

²⁰ Robert Keohane dan Joseph Nye, *Power and Complex Interdependence*, (Boston: Scott Foresman and Company, 1989), hlm. 24-25.

²¹ David A. Baldwin, *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*, (New York: Columbia University Press, 1993), hlm. 12

tahun terakhir, kerja sama ekonomi antar negara dan antar kawasan banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia.

Untuk membahas mengenai hubungan ekonomi ASEAN dan UE, penulis akan menggunakan teori integrasi ekonomi. Teori integrasi ekonomi muncul dari pemikiran Joseph Viner pada tahun 1950. Menurut Viner, dampak suatu negara menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi dengan negara lain adalah terciptanya sebuah *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* adalah sebuah istilah yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menggambarkan peningkatan arus perdagangan yang disebabkan oleh terbentuknya sebuah kawasan perdagangan bebas atau serikat pabean. Dalam *trade creation* terjadi perubahan impor dari produsen domestik dengan harga tinggi menjadi produsen dengan harga rendah dari negara anggota. Sedangkan *trade diversion* menggambarkan kondisi ketika impor berubah dari produsen dengan harga rendah di negara dunia ketiga menjadi impor dari produsen dengan harga yang tinggi di negara anggota kerja sama. *Trade creation* berdampak pada peningkatan kesejahteraan suatu negara sedangkan *trade diversion* menurunkan kesejahteraan negara tersebut. Bagi Viner, alasan suatu negara tergabung dalam perjanjian kerja sama ekonomi dikarenakan negara tersebut melihat manfaat yang diberikan dari adanya kerja sama tersebut.²²

Pemikiran dari Bela Balassa berkontribusi pada perkembangan teori integrasi ekonomi. Balassa mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai suatu proses dan kondisi negara. Proses berarti meliputi pengukuran untuk menghilangkan

²² Joseph Viner, *the Custom Union Issues*, (New York: Carneige Endowment for International Peace, 1950) Hlm. 45.

diskriminasi antara unit ekonomi di negara lain. Sedangkan, definisi sebagai kondisi negara menunjukkan bahwa integrasi ekonomi adalah penghapusan berbagai diskriminasi antara unit-unit ekonomi nasional.²³ Integrasi ekonomi muncul akibat globalisasi ekonomi yang mendorong negara atau organisasi regional untuk membentuk kerja sama atau regionalisasi ekonomi. Menurut Balassa terdapat enam tahap dalam integrasi ekonomi:²⁴

2.1 Preferential Trading Area

Sebuah blok perdagangan yang memberikan pengurangan hambatan tarif pada produk-produk tertentu antara negara-negara yang tergabung dalam blok perdagangan tersebut.

2.2 Free Trade Agreement

Kawasan perdagangan yang menghilangkan hambatan tarif kepada negara-negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut.

2.3 Custom Unions

Kawasan perdagangan yang menghilangkan hambatan perdagangan dan menerapkan tarif yang sama dengan negara non-anggota.

2.4 Common Market

Merupakan sebuah *custom union* yang meniadakan hambatan-hambatan perdagangan dan faktor produksi.

2.5 Economic Union

Sebuah *custom union* dengan adanya harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan.

2.6 Total Economic Union

Sebuah kesatuan moneter, fiskal, dan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional yang keputusannya mengikat kepada seluruh negara anggota.

²³ Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration*, (Inggris: Richard D. Irwin, Inc, 1961), hlm.1.

²⁴ *Ibid*, hlm. 5

Balassa berargumen, seiring dengan peningkatan integrasi ekonomi antaranegara, maka hambatan antara kedua pasar akan semakin berkurang. Menurut Balassa efek dinamis dari integrasi ekonomi adalah peningkatan ekonomi, perubahan teknologi, serta perubahan dalam struktur pasar dan daya saing, peningkatan produktivitas, munculnya risiko dan ketidakpastian, serta munculnya aktivitas investasi.²⁵

Menurut Gordon M Gough dan Sivakumar, FTA adalah fondasi negara untuk menformalkan kerja sama regional. FTA memiliki kemampuan untuk menyeragamkan atribut regional dan mengurangi ancaman ekonomi regional. Dengan adanya kerja sama perdagangan intra dan inter regional, maka dapat meningkatkan pertumbuhan antara negara dan di dalam negara.²⁶ Karena keberadaan integrasi ekonomi sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, dalam beberapa tahun terakhir banyak kita temukan perjanjian ekonomi yang fokus pada pembentukan kawasan perdagangan bebas. *North American Free Trade Area (NAFTA)*, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, dan *Commonwealth of Independent States Free Trade Area (CISFTA)*. Keberadaan pasar bebas dan minimnya hambatan dapat meningkatkan kemungkinan integrasi antara kedua pihak, sehingga kerja sama yang terbentuk nantinya bukan hanya fokus pada ekonomi tetapi juga politik, sosial, teknologi, dan bidang-bidang lain.

²⁵ Balassa, *The Theory of Economic Integration*, hlm. 117.

²⁶ Gordon M. Gough dan Sivakumar Venkataramny, "Regional Economic Cooperation," *International Business & Economic Research Journal* 5 no. 2, (2006):50.

Menurut Alejandro Foxley, ada beberapa prasyarat untuk mencapai integrasi ekonomi yang sukses. Pertama, perjanjian kerja sama regional dapat mencapai potensi penuh ketika terdapat sedikit perbedaan politik dan ideologi antara kedua pihak yang akan berkerja sama. Kedua, perjanjian kerja sama regional dapat berjalan dengan baik apabila anggota mengkoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal. Terakhir, tujuan perjanjian kerja sama regional yang ambisius akan lebih mudah tercapai apabila dalam proses negosiasi seluruh negara terbuka pada liberalisasi perdagangan atau mendukung liberalisasi perdagangan secara multilateral.²⁷

Konsep lain yang di gunakan untuk menganalisis hubungan ASEAN dan UE adalah konsep interregionalisme. Ada beberapa pengertian terkait interregionalisme. Menurut Roloff, hubungan interregionalisme muncul sebagai bentuk kerja sama antar aktor dan merupakan hasil dari keseimbangan institusional. Globalisasi ekonomi menciptakan tekanan daya saing baru dan negara kemudian merespons dengan membentuk kerja sama kawasan.²⁸ Rulland mendefinisikan interregionalisme sebagai dialog kawasan dengan pertemuan informal maupun tingkat tinggi dengan tujuan untuk bertukar informasi dan kerja sama di area-area tertentu seperti perdagangan dan investasi, lingkungan, dan memberantas kejahatan transnasional. Interregionalisme di dasari tingkat kelembagaan yang rendah dengan kedua kawasan bergantung pada struktur

²⁷ Alejandro Foxley, "Regional Trade Blocs The Way to the Future?" *Carnegie Endowment for International Peace*, (2010): 6-7.

²⁸ Ibid, 36.

kelembagaan masing-masing.²⁹ Sedangkan menurut Aggarwal dan Forgy, interregionalisme adalah hubungan antar pemerintah lintas kawasan yang fokus pada hubungan komersial dan kerja sama fundamental dengan tujuan untuk menguntungkan kedua pihak melalui kerja sama timbal balik. Kelompok regional bersedia menjalin kerja sama antarkawasan karena faktor eksternal dan domestik.³⁰ Dalam studi hubungan internasional, meskipun konsep interregionalisme bukanlah fenomena baru, pengkajian akan konsep interregionalisme masih jarang dilakukan. Ada tiga bentuk interregionalisme:

- 1 *Region-to-region Relations*, hubungan antara dua atau lebih organisasi kawasan yang terjalin seperti melalui kemitraan dialog, contohnya adalah kemitraan dialog Uni Eropa dengan ASEAN.
- 2 *Biregional dan transregional arrangement*, hubungan antarkawasan dalam lingkup ini masih tergolong baru dan muncul dalam konteks Triad Baru, hubungan triangular antara negara dengan ekonomi besar yaitu Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur. Contohnya adalah *East Asia- Latin America Forum*.
- 3 *Hybrid interregionalism*, hubungan antara organisasi kawasan dengan satu negara seperti EU – Tiongkok, dan ASEAN – Australia.³¹

Teori-teori besar seperti realisme, liberalisme-institusionalisme, dan konstruktivisme berpengaruh dalam menjelaskan konsep interregionalisme.

²⁹ Rulland, J, "ASEAN and European Union: A Bumpy Interregional Relationship," *Discussion Paper C95 Center for European Integration*, (2001):3-4.

³⁰ Vinod Aggarwal dan Edward Fogarty, *European Union Trade Strategies: Between Globalism and Regionalism*, (Basingstoke: Palgrave, 2004): 208.

³¹ Heiner Hanggi, Ralf Roloff, dan Jurgen Rulland, *Interregionalism and International Relations*, New York: Routledge (2006): 34 – 40.

Pandangan realisme mengkaji dinamika rivalitas dalam regionalisme dan *balancing games* antara aktor-aktor kawasan. Kontras dengan realisme, liberalisme-institusional menggarisbawahi kebutuhan untuk berkerja-sama dengan tujuan mengatur *complex interdependence* dalam level interregional. Terakhir dari sudut pandang sosial-konstruktivis akan merujuk pada pembentukan identitas dalam interaksi internasional.³²

Ada beberapa refleksi teoretis yang menjelaskan fungsi-fungsi interregionalisme. Menurut Ruland ada 5 fungsi dari inter dan transregionalisme, 1) *balancing*, dalam sistem internasional, interregionalisme dilihat sebagai alat dari negara Triadik untuk menjaga atau menciptakan ulang sebuah equilibrium di antara mereka dan kawasan peripheral untuk dapat mengikuti dinamika dari negara Triad. 2) *institution-building*, dialog interregional memiliki aspek institusional dalam komponen organisasi kawasan, dengan menciptakan sebuah kebutuhan akan kesamaan pandangan dan peningkatan intensitas konsultasi dan koordinasi. 3) *rationalizing*, merujuk pada fakta bahwa institusi multilateral global harus bersaing dan meningkatnya kompleksitas dan kebijakan teknis, serta peningkatan jumlah aktor yang kerap merepresentasikan perbedaan kepentingan. Dialog interregional harus memberikan jalan keluar bagi jalan buntu yang sering ditemui dalam institusi multilateral global. 4) *Agenda setting*, instusi interregional berfungsi untuk menciptakan *agenda-setting* dalam dialog interregional untuk

³² Jurgen Ruland, "the EU as interregional Actor: the Asia-Europe Meeting (ASEM)," dipresentasikan pada *Asia –Europe on the Eve of the 21st Century International Conference* (1999): 3 – 7.

mengharmonisasikan kebijakan. 5) *promotion of development*, interregionalisme pada umumnya terbentuk karena objektivitas dari organisasi kawasan.³³

Dari penjelasan mengenai teori neoliberalisme, teori integrasi ekonomi, dan konsep interregionalisme dapat dilihat keduanya dapat menjelaskan mengenai pembentukan organisasi ASEAN dan UE. Kehadiran ASEAN dan UE dilihat oleh neoliberalisme sebagai bentuk kerja sama baru yang menginstitusikan negara-negara dalam suatu organisasi internasional. Sedangkan teori integrasi ekonomi digunakan untuk menganalisis alasan negara atau organisasi membentuk kerja sama perdagangan. Menurut teori integrasi ekonomi, kerja sama perdagangan memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu pemilihan teori neoliberalisme dan teori integrasi ekonomi dianggap dapat membantu dalam analisis penelitian ini.

1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metodologi Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan analisis data yang sumbernya berupa teks, bacaan, atau gambar.³⁴ Dalam metode kualitatif, proses penelitian akan dimulai dengan

³³ Ibid, 310.

³⁴ John. W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: Sage Publications, 2009), hlm. 174

mengolah pernyataan yang kemudian akan diolah untuk membangun analisis yang sifatnya umum menjadi spesifik, dan diakhiri dengan interpretasi data oleh peneliti.³⁵ Metode kualitatif dapat menggali lebih dalam permasalahan yang terjadi dimasyarakat dengan mencari informasi yang sifatnya terbuka.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Laswell, ada empat teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi audio-visual.³⁶ Penelitian ini akan menggunakan teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka menjadikan dokumen-dokumen publik seperti buku, majalah, koran, laporan resmi, artikel dalam jurnal, dan surat sebagai sumbernya. Penelitian ini akan menggunakan sumber-sumber seperti artikel dalam jurnal, buku, koran, dan laporan resmi terkait hubungan ASEAN-UE, terutama dalam bidang perdagangan dan negosiasi FTA. Untuk menambah sumber, penulis juga akan menggunakan data yang bersumber dari situs berita daring, dan situs resmi ASEAN, dan UE. Penelitian ini akan menggunakan analisis konten sebagai metode pengolahan data. Analisis konten merupakan metode pengolahan data dengan mengetahui simpulan dari sebuah teks.³⁷ Penggunaan metode ini dianggap sesuai dengan teknik

³⁵ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, hlm. 40.

³⁶ Ibid, hlm. 179 – 180.

³⁷ Robert Philip Weber, *Basic Content Analysis*, (California: Sage Publication, 1990) hlm. 15.

pengumpulan data yang digunakan, yaitu teks-teks yang bersumber dari situs resmi, buku, jurnal, koran, dan laporan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Bab I memberikan pemaparan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan teknik pengumpulan data. **Bab II** akan menjelaskan mengenai integrasi ekonomi di ASEAN dan UE, hubungan ekonomi ASEAN dengan UE. **Bab III** membahas mengenai negosiasi ASEAN–EU FTA. **Bab IV** merupakan analisis mengenai faktor-faktor dibalik penundaan ASEAN–EU FTA. **Bab V** merupakan bab terakhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan.